

PERAN ICMI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rohman

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Pada masa Orde Baru tepatnya pada tahun 1990 berdirilah sebuah organisasi kaum cendekia Muslim yang bernama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Pendirian ICMI menjadi salah satu peristiwa bersejarah sepanjang periode pemerintahan Orde Baru karena kemunculannya dianggap sebagai salah satu bentuk berpalingnya arah kebijakan pemerintahan Suharto yang awalnya cenderung antipati terhadap umat Islam kemudian pada saat itu justru menjadikan Islam sebagai bagian dari pemerintahan Orde Baru. ICMI memiliki peran yang cukup strategis untuk mewujudkan tujuan berdirinya Negara dan sekaligus menjadi salah satu tujuan organisasi ini yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat. Munculnya industrialisasi di Indonesia tentu memiliki efek positif maupun negatif. Efek positifnya tentu dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun tentu hasil pertumbuhan ekonomi ini belum dapat secara merata dirasakan oleh masyarakat. Salah satu peran yang dilakukan oleh ICMI setelah berdiri selama adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: ICMI, Pemberdayaan Masyarakat,

A. Pendahuluan

ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia) bukan organisasi dengan basis intelektual Muslim pertama yang berdiri di Indonesia. Beberapa organisasi intelektual Muslim pernah dilahirkan dan dibentuk pada periode pemerintahan yang berbeda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda atau periode sebelum kemerdekaan misalnya lahir organisasi intelektual Muslim muda yang bernama Jong Islamiten Bond (JIB) yang berdiri pada tahun 1925. Selanjutnya pada masa Orde Lama lahirlah dua organisasi intelektual yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan

Mahasiswa Islam (HMI) yang keduanya berdiri pada tahun 1947. Sementara pada masa Orde Baru, terdapat beberapa organisasi cendekiawan Muslim yang berusaha didirikan seperti Ikatan Sarjana Islam Indonesia (ISII) yang merupakan organisasi yang didukung oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FKPI), sebuah organisasi kaum intelektual Muslim yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1986.¹

Namun karena pemerintahan Suharto merupakan pemerintahan yang didominasi oleh kekuatan militer, pembentukan organisasi dengan basis massa Muslim atau kelompok-kelompok agama lainnya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dengan menjalankan pemerintahan yang sentralistik dan otoriter, Orde Baru berusaha mengekang kebebasan individu dan kelompok untuk memperlancar program pembangunan dan memelihara keamanan yang dicanangkan oleh Suharto dan dijalankan oleh jajaran aparatnya. Terkait dengan umat Islam, pemerintah Orde Baru sangat membatasi kebebasan tokoh-tokoh Muslim untuk bergerak. Islam dianggap bahaya sektarian yang akan menghambat laju pembangunan di Republik ini. Untuk membatasi pergerakan politik Muslim di Indonesia, pemerintah Orde Baru menjalankan beberapa kebijakan seperti menolak kembalinya Piagam Jakarta ke dalam konstitusi,² melarang partai Masyumi dan tokoh-tokoh Masyumi untuk berperan dalam partai Muslimin Indonesia (Pasmusi), dan memfusikan partai-partai Islam menjadi satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah Pemilu tahun 1971. Kebijakan Pemerintahan Orde Baru semakin memperlebar jarak dengan umat Muslim di Indonesia ketika pada tahun 1973 sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menaikkan status para penganut Kepercayaan menjadi sama dengan penganut agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada masa persidangan MPR

*Rohman adalah salah satu dosen di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹ Organisasi ini tidak lama berdiri karena MUI sendiri khawatir bahwa pemerintah akan membubarkannya. Yudi Latif, *Indonesian Muslim Intelligentsia and Power*, (Singapore: ISEAS, 2008), h. 431.

² Piagam Jakarta merupakan kesepakatan umat Islam bangsa Indonesia yang menghendaki masuknya frase “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”.

tahun 1973 ini juga sidang berusaha untuk menyatukan hukum pernikahan dan perceraian dengan membatasi peran pengadilan Islam. Belum lagi seluruh partai politik dan organisasi sosial yang ada diwajibkan oleh pemerintah untuk mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal. Sikap dan kebijakan Orde Baru terhadap umat Islam dan politik Islam menjadikan umat Muslim menganggap bahwa Orde Baru yang dipengaruhi oleh kelompok Ali Moertopo dan Cina Katolik merupakan penghalang utama bagi pelaksanaan kepentingan umat Islam.

Namun, sikap Suharto terhadap Islam politik sangat bersebrangan dengan kebijakan pemerintah dalam aspek kebudayaan Islam. Paling tidak ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yaitu dengan mendukung berdirinya IAIN di berbagai provinsi di Indonesia yang kemudian menghasilkan banyak lulusan yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan Aqidah Islam, Hukum, Seni, dan Kemampuan Mengajar. Kebijakan lainnya adalah dengan kebijakan pembangunan masjid, mushola, dan madrasah baik di Jawa maupun luar Jawa yang disponsori oleh Kementerian Agama. Presiden Suharto sendiri melalui Yayasan Amal Bakti Muslimin Pancasila mensponsori pembangunan ribuan masjid dan mendukung para da'i untuk berdakwah di penjuru Nusantara.³

Sikap politik Suharto terhadap umat Islam mulai berubah pada tahun 1980an ketika Ali Murtopo meninggal dunia pada tahun 1984 yang menyebabkan terbentuknya konfigurasi baru dalam lingkaran politik Suharto. Ketua Golkar pada periode 1983-1988, Soedarmono, misalnya mulai mengakomodasi aktivis Islam seperti Akbar Tanjung, K.H. Tarmudji, Ibrahim Hasan, Anang Adenansi, dan Qudratullah.⁴ Bahkan cendekiawan Muslim seperti Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid menjadi perwakilan Golongan Karya (Golkar) di MPR. Pada saat yang bersamaan, Suharto mulai mempromosikan kekuatan ABRI hijau dan intelektual Muslim pada pemerintahan Orde Baru sehingga muncullah nama-nama seperti Mar'ie Muhammad,

³ Robert W. Hafner, Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class, in *Indonesia* (56 Okt. 1993): 1-35.

⁴ *Op.cit.*, Yudi Latif, h. 416-417.

Bedu Amang, Muslim Nasution, Sajuti Hasibuan, dan lain-lain.⁵ Sebagian nama-nama tersebut kemudian masuk dalam Kabinet Pembangunan ke-V (1988-1993) dan mewarnai Pemerintahan Orde Baru yang sebelum itu didominasi oleh menteri berpaham sekuler-*abangan*.⁶ Sampai titik ini menurut Hefner telah nampak adanya perubahan yang mendasar antara sepuluh tahun pertama Orde baru yang bercorak kejawen menjadi Orde Baru yang bercorak Islam pada tahun 1980an di mana Islam telah dianggap telah berhasil melakukan islamisasi di pulau Jawa dan pada level tertentu di Indonesia.⁷

Dengan hadirnya kaum intelektual Muslim di kancah nasional dan pada saat yang sama terjadinya proses islamisasi secara kultural di level *grass root*, memunculkan keinginan sebagian tokoh intelektual Muslim untuk menyatukan kelompok intelektual Muslim di Indonesia dalam satu wadah. Padahal menurut Hefner, inisiasi pembentukan organisasi cendekiawan ini secara nasional sebetulnya sudah dilakukan dengan terbentuknya Persatuan Sarjana Muslim Indonesia yang berdiri pada tahun 1964 yang bertujuan untuk melawan pengaruh pemikiran partai Komunis dan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Abangan* salah satu dari tiga kategori yang dimunculkan oleh Clifford Geertz untuk merujuk pada Muslim yang kurang memiliki kedekatan pada agama Islam yang mereka peluk. Sebaliknya kelompok ini lebih menekankan pada praktek-praktek agama Hindu-Budha atau ajaran leluhur mereka sebelum Islam datang di tanah Jawa. Namun terminologi yang dibuat Geertz untuk membuat klasifikasi umat Islam ini cenderung bermasalah karena banyak orang yang beragama Islam dan mempraktekkan ajaran Hindu-Budha yang tidak menyebut diri mereka sebagai *abangan*. Mereka lebih nyaman mengidentifikasi dirinya dengan kata Muslim atau Kejawen untuk menyebut secara terbuka bahwa mereka mempraktekkan mistisme atau ajaran agama Jawa. Terminologi ditentang oleh Hodgson yang berpendapat bahwa termonologi *abangan* yang dibuat oleh Geertz terlalu dipengaruhi oleh mazhab Islam yang menekankan pelaksanaan ajaran syariah dengan ketat sehingga menganggap apa yang tidak Islami yang dipraktekkan oleh orang Jawa sebagai "Hindu". Lihat Marshal Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. 2 (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), h. 551f. Sementara, Mark Woodward berpendapat bahwa justru Islam telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat Jawa dengan cukup mendalam. Terminologi *abangan* menurutnya telah mereduksi pengaruh Islam pada satu sisi dan memunculkan pengaruh Hindu secara signifikan. Mark Woodward, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*, (Tuscon: University of Arizona Press, 1989). Dua kategori lain yang dimunculkan oleh Geertz yaitu *santri* dan *priyayi*. Tiga kategori yang dibuat oleh Geertz pada kenyataannya tidak dapat diterapkan di seluruh pulau Jawa karena dalam prakteknya banyak ditemukan adanya *priyayi* yang mempraktekkan ajaran Islam secara kaku. Begitupun kelompok *abangan* yang pada prakteknya juga menganggap diri mereka sudah berislam dengan benar.

⁷ *Op. Cit.* Hefner.

memainkan peran penting dalam menopang presiden Suharto hingga tahun 1967. Namun organisasi ini tidak dapat bertahan lama karena adanya konflik kepemimpinan internal.⁸ Melalui kerja keras beberapa mahasiswa dan tokoh Muslim pada awal tahun 90an, terbentuklah komitmen untuk mendirikan organisasi kecendekiaan di mana B.J. Habibie disepakati untuk memimpin organisasi ini.

Kelahiran ICMI secara resmi terjadi ketika dibukanya symposium nasional pada tanggal 6 Desember 1990 di Kota Malang yang dibuka langsung oleh Suharto, presiden Republik Indonesia. Dengan berdirinya ICMI yang didukung penuh pemerintahan Suharto menjungkirbalikkan pemahaman sebagai pengamat tentang Indonesia yang awalnya melihat sosok Suharto sebagai seorang *abangan* yang tidak begitu peduli pada Islam namun kemudian menjadi salah satu pendukung utama organisasi yang justru memperdalam proses Islamisasi di tengah masyarakat Indonesia.⁹ Langkah Suharto ini lebih lanjut menunjukkan bahwa Suharto mulai meninggalkan prinsip-prinsip non-sekatarian yang terbangun selama lebih dari dua dekade sejak Orde Baru berkuasa.¹⁰

Berubahnya sikap Suharto terhadap umat Islam ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan sikap politik Suharto. Pertama, Suharto melihat bahwa terjadi arus pertumbuhan intelektual Muslim Indonesia yang cukup signifikan dengan adanya lulusan-lulusan PhD dari luar negeri dan sarjana-sarjana Muslim yang dihasilkan oleh pendidikan dalam negeri.¹¹ Menurut Yudi Latif, periode antara tahun akhir tahun 70an hingga 1990 jumlah sarjana Muslim meningkat secara signifikan. Pada tahun 1976 misalnya hanya terdapat 16.218 sarjana Muslim sementara jumlahnya meningkat tajam pada satu dasawarsa setelahnya di mana terdapat 71.516 sarjana Muslim pada tahun 1985.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* Menurut Hafner, perubahan sikap Suharto yang cukup drastis ini yang terjadi hanya dalam hitungan tahun merupakan pertanyaan besar yang harus dijawab. Kisah tentang lima orang mahasiswa yang menginginkan terbentuknya ICMI di level nasional merupakan simplifikasi.

¹¹ *Ibid.* lihat juga Yudi Latif, *op. cit.* h. 419.

Faktor internal lainnya adalah terjadinya konflik antara Presiden Suharto dan Jenderal L.B. Moerdani menjelang dan setelah terjadinya Pemilu tahun 1988. Pada tahun 1988, Suharto memberhentikan L.B. Moerdani sebagai panglima ABRI dan menggantinya dengan Tri Soetrisno. Hal ini disebabkan kritik yang dilontarkan oleh L.B. Moerdani kepada bisnis anak-anak Suharto dan keengganannya untuk memfasilitasi bisnis anak-anak Suharto di bidang militer. Selain itu adanya persaingan politik antara L.B. Moerdani dan Soedharmono untuk memperebutkan kursi Wakil Presiden juga dinilai sebagai pemicu ketegangan antara Suharto dan militer khususnya para pendukung L.B. Moerdani.¹² Ketegangan kemudian menjadi salah satu alasan bagi Suharto untuk mencari partner strategis yang dapat mendukung Suharto di tengah menurunnya dukungan dari pihak militer.

Kedua, dari aspek eksternal, presiden Suharto sangat sadar terhadap perubahan yang terjadi di belahan dunia Muslim seperti Aljazair dan Libanon. Dengan jumlah Muslim yang demikian besar, sangat riskan jika kelompok ini menjadi oposisi pemerintah Orde Baru. Sehingga akhirnya Suharto merubah kebijakan Orde Baru yang menekan umat Islam menjadi “mendukung dan melindungi” kepentingan umat Islam.¹³ Dalam kondisi ini umat Muslim menemukan kesempatan untuk menyatukan cendekiawan Muslim di Indonesia. B.J. Habibi, menteri Riset dan Teknologi pada kabinet Pembangunan sejak tahun 1978-1998, terpilih secara aklamasi sebagai ketua ICMI dalam symposium nasional selama tiga hari di Kota Malang yang dibuka pada tanggal 6 Desember 1990 sampai tanggal 8 Desember 1990 dengan melibatkan 500 orang cendekiawan Muslim se-Indonesia.¹⁴ Berdirinya ICMI yang didukung penuh oleh Suharto selanjutnya membuat hubungan antara umat Islam dan pejabat menjadi semakin terbuka dan bahkan para pejabat yang pada awalnya takut untuk mempraktekkan Islam menjadi semakin terbuka untuk menampakkan keislamannya.

¹² *Ibid.* h. 435.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <http://www.icmi.or.id/organisasi/sejarah#>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

Kemunculan ICMI sebagai organisasi yang menyatukan seluruh kaum cendekia di bawah satu organisasi di Indonesia ini bukannya tanpa kritik. Beberapa kritikan muncul sebagai akibat dari rivalitas politik yang ada dalam lingkaran kekuasaan Suharto yang berorientasi Katolik-sekular, maupun dari tubuh umat Islam sendiri. Abdurrahman Wahid misalnya mengatakan bahwa ICMI justru membuat Islam menjadi eksklusif dan kontra produktif di tengah usaha Abdurrahman Wahid dan organisasinya yang bernama Forum Demokrasi dalam mengkampanyekan pluralisme dan demokarasi. Kritik juga datang dari petinggi militer yang memandang berdirinya ICMI sebagai ancaman terhadap legitimasi Pancasila sebagai ideologi negara.

ICMI sebagai sebuah organisasi memiliki kepengurusan di tingkat pusat (Orpus), wilayah (provinsi) disebut dengan Orwil, kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Orda (Organisasi Daerah), dan kepengurusan di tingkat kecamatan atau kampus yang disebut dengan Orsat. Pada tahun 1997 anggota ICMI sudah mencapai 10.501 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dengan beragam tingkat pendidikan. Tahun berikutnya, keanggotaan ICMI mencapai angka 18.377 anggota yang tertera dalam data base ICMI.¹⁵ Kepengurusan ICMI terutama di tingkat pusat terdiri dari beragam kaum cendekiawan yang memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang tidak homogen. Hal ini mengakibatkan corak pemikiran yang beragam. Douglas Ramage misalnya membagi pengurus ICMI dalam tiga kategori; kelompok ulama-sarjana yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholis Madjid dan Dawam Rahardjo, kelompok aktivis Muslim-politisi yang diwakili oleh Amin Rais, Imaduddin Abdul Rahim, Nasir Tamara, Dien Syamsuddin, Sri Bintang Pamungkas, dan Adi Sasono, dan kelompok birokrat yang diwakili oleh Wardiman Djojonegoro, Harjanto Dhanutirto, dan Moenawir Sjadzali.¹⁶

Kemunculan ICMI yang didukung penuh oleh media massa ketika itu kemudian memunculkan spekulasi adanya islamisasi dalam tubuh birokrasi dan pemerintahan

¹⁵ Yudi Latif, h. 443-444.

¹⁶ Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, (London: Routledge, 1995), h. 47-48.

Suharto. Pada Kabinet Pembangunan ke-6 misalnya terdapat beberapa nama yang dianggap berafiliasi kepada ICMI diantaranya B.J. Habibie sebagai menteri Riset dan Teknologi, Wardiman Djojonegoro sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Haryanto Dhanutirto sebagai menteri Perhubungan, Azwar Anas sebagai menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Beddu Amang sebagai Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog, Harmoko sebagai menteri Penerangan, Saleh Afiff sebagai menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan, Tarmizi Taher sebagai menteri Agama, dan Hajono Soejono sebagai menteri Kependudukan/Kepala BKKBN, dan Mar'ie Muhammad sebagai Menteri Keuangan. Pada era cabinet Pembangunan inilah muncul istilah *ijo royo royo* yaitu ungkapan yang menunjukkan adanya representasi Cendekiawan Muslim yang cukup besar di dalam kabinet ini.

Tidak semua cendekiawan yang terlibat dalam kepengurusan ICMI mendapatkan tempat di kabinet. Beberapa cendekiawan kritis dan vokal terhadap kebijakan Orde Baru seperti Amin Rais, Adi Sasono, Dawam Rahardjo, dan Sri Bintang Pamungkas misalnya tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi kelompok penyeimbang pemerintahan. Namun karena ICMI telah menjadi bagian pemerintahan Orde Baru dan keinginan untuk menyelamatkan kepentingan ICMI, Amin Rais memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengurus ICMI agar lebih leluasa dalam menyampaikan kritiknya terhadap Orde baru yang dinilainya sebagai pemerintahan yang penuh dengan korupsi dan kolusi. Kelompok cendekiawan kritis inilah yang kemudian berperan besar dalam gerakan reformasi yang kemudian dapat mengakhiri pemerintahan Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun pada tahun 1998. Pada tahun itulah tonggak Era Reformasi dimulai dengan memunculkan cendekiawan Muslim kritis sebagai bagian dari pemerintahan. Amin Rais misalnya menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 sebagai hasil dari Pemilu pertama era Reformasi pada tahun itu.

Setelah Suharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, B.J. Habibie yang menggantikan Suharto kemudian membentuk kabinet baru pada tanggal 23 Mei 1998 dan kabinet ini berakhir pada tanggal 22 Oktober 1999. Habibie memberi nama kabinet ini dengan kabinet “Reformasi Pembangunan”. Diantara para menteri yang berasal dari ICMI yaitu Adi Sasono sebagai menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah, A.M. Saefudin sebagai menteri negara Pangan dan Holtikultura, Soleh Solahudin (pengganti A.M. Saefudin), Malik Fajar menteri Agama, Muslimin Nasution sebagai menteri Kehutanan dan Perkebunan, Marzuki usman sebagai menteri Pariwisata, Seni dan Budaya, Fahmi Idris sebagai menteri Tenaga Kerja, Tuti Alawiyah sebagai menteri Negara Peranan Wanita, Muladi sebagai menteri Negara Sekretaris Negara, dan Rahadi Ramelan sebagai menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Era pemerintahan B.J. Habibie sebagai presiden RI yang menggantikan Suharto ternyata tidak berlangsung lama. Walaupun Habibie sebetulnya berhak untuk menjabat sebagai presiden hingga tahun 2002 berdasarkan UUD 1945 pasal 8 yang menyatakan bahwa wakil presiden berhak untuk menyelesaikan satu periode pemerintahan, perubahan politik yang begitu cepat akhirnya menghendaki Pemilu yang dipercepat. Habibie kemudian menetapkan Pemilu pertama di era Reformasi pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik yang lolos seleksi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilu pertama di era Reformasi ini oleh banyak pengamat disebut sebagai pemilu multi partai kedua dalam sejarah demokrasi Indonesia setelah Pemilu pertama dan juga disebut sebagai Pemilu yang paling bersih sejak Pemilu pertama pada tahun 1955.

Era kebebasan politik pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru ini kemudian memunculkan efek “negative” dalam politik Islam di Indonesia. Jika pada era Orde Baru, para tokoh cendekiawan Muslim dapat disatukan dalam satu wadah bernama ICMI, maka pada era ini banyak para cendekiawan ICMI yang melihat era Reformasi sebagai peluang untuk lebih menunjukkan egoism politiknya. Beberapa pengurus

ICMI misalnya mendirikan partai sebagai kendaraan politiknya untuk mencapai kekuasaan. Amin Rais misalnya mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), Yusril Ihza Mahendra mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), Nur Mahmudi Ismail mendirikan Partai Keadilan (PK), Adi Sasono mendirikan Partai Daulat Rakyat (PDR), serta Sholahudin Wahid dan Yusuf Hasyim mendirikan Partai Kedaulatan Umat (PKU).¹⁷

Dengan munculnya partai-partai politik di masa Reformasi, cendekiawan Muslim yang tergabung dalam ICMI mulai memikirkan jalannya sendiri-sendiri untuk mencapai tangga kekuasaan. Habibi sendiri sebagai tokoh sentral dalam kepengurusan ICMI dan menjadi presiden RI yang menggantikan Suharto terpaksa harus menyerahkan mandatnya kepada MPR karena laporan pertanggungjawaban presiden Habibi ditolak oleh MPR pada tanggal 14 Oktober 1999. Selesai era pemerintahan B.J. Habibie memunculkan fase baru dalam konteks politik Islam di Indonesia. Pada dasa warsa pertama, ICMI terlalu menekankan pada ketokohan dan “kedekatan” politik Habibie kepada Suharto sehingga menyebabkan adanya anggapan bahwa Islam menjadi bagian dari *status quo* yang harus ditolak oleh semangat Reformasi. Setelah Habibie sendiri lengser, para aktivis dan tokoh ICMI yang memiliki dukungan politik yang kuat lambat laun menanggalkan ICMI dan menjadikan partai politik sebagai kendaraan politik yang cenderung lebih membuka diri terhadap kenyataan keanekaragaman (pluralitas) di Indonesia dan tidak lagi mengedepankan identitas keislaman mereka. Politisi dengan latar belakang ICMI pada era presiden Abdurrahman Wahid tetap menjadi bagian penting dari pemerintah namun peran politik Habibie dengan sendirinya sudah sangat berkurang.

Peran politik ICMI pasca lengsernya Habibie sebagai presiden keempat Republik Indonesia semakin memudar. Para menteri yang dipercaya masuk dalam Kabinet Abdurrahman Wahid (Gusdur) memang ada beberapa orang yang memiliki latar belakang dan kedekatan dengan ICMI namun terpilihnya mereka sebagai bagian dari

¹⁷ Yudi Latief, h. 436.

pemerintahan pada era Abdurrahman Wahid lebih cenderung disebabkan oleh sokongan politik mereka yang masing-masing mewakili partai politik. Kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional ini mulai melaksanakan tugas pada tanggal 26 Oktober 1999 dan berakhir akibat adanya mosi tidak percaya parlemen kepada Abdurrahman Wahid yang mengakibatkan selesainya kabinet ini pada tanggal 9 Agustus 2001. Beberapa tokoh ICMI itu diantaranya Yusril Ihza Mahendra sebagai menteri Hukum dan Perundang-undangan yang mewakili Partai Bulan Bintang (PBB), Muhammad Yusuf Kalla yang mewakili Golkar, dan Nur Mahmudi Ismail yang mewakili Partai Keadilan (PK).

Namun demikian kiprah ICMI tidak berhenti ketika peran politiknya memudar pada awal Reformasi. ICMI pada periode Reformasi telah memasuki fase baru dengan lebih menekankan pada aspek pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga tempat berkumpulnya kaum cendekia di negeri ini. Peran ini sesungguhnya sudah dilaksanakan oleh ICMI sejak awal pendiriannya. Beberapa program yang diinisiasi ICMI terbukti berhasil melewati krisis dan berlanjut hingga saat ini.

B. ICMI dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*people empowerment*) merupakan salah satu perspektif mengenai pembangunan masyarakat yang muncul pada tahun 1970an. Konsep ini secara umum menganggap bahwa peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan sebuah keharusan di alam demokrasi yang menganggap rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan kekuasaan. Menurut Eko Prasajo, ada beberapa definisi operasional dari pemberdayaan masyarakat.

Pertama, pemberdayaan pada dasarnya memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang dan tidak berdaya (*powerless*) baik secara individual maupun kolektif agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Sehingga tujuan utama pemberdayaan pada dasarnya adalah membantu individu atau komunitas untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan

dilakukan agar dapat mengurangi beban dan menentukan masa depan mereka dengan mandiri. Kedua, proses pencapaian pemberdayaan masyarakat ditekankan pada proses pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya yang disebut dengan kecenderungan primer. Pada saat yang sama, terdapat proses pemberian stimulant, dorongan, dan motivasi agar individu dan masyarakat memiliki kemampuan dalam menentukan kebutuhan hidupnya melalui proses dialog. Ketiga, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi namun juga aspek politik, hukum, social, budaya, ekologi, dan spiritual. Keempat, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program yang berisi tahapan-tahapan kegiatan dengan jangka waktu pencapaian yang sudah ditentukan dan dapat dilihat sebagai proses yang berfungsi agar masyarakat mempersiapkan struktur dan system yang proaktif dan responsive terhadap kebutuhan dan permasalahan yang muncul di masyarakat. Kelima, pemberdayaan melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat lebih mengetahui permasalahan, mampu menyelesaikan setiap masalah, dan memiliki potensi. Terakhir, pemberdayaan masyarakat mencangkup pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (*community based development*).¹⁸

Dalam pandangan ICMI yang dipaparkan dalam Silaturahmi Kerja nasional (Silaknas) tahun 2006 menyebutkan bahwa masalah kemiskinan dan pengangguran bukan hanya terkait dengan masalah ekonomi semata namun juga menyangkut masalah non ekonomi seperti pendidikan, keamanan, stabilitas politik, kepastian hukum, *good governance*. ICMI menilai bahwa diperlukan pendekatan ekonomi alternative yang bertujuan untuk mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Penerapan nilai-nilai luhur bangsa ini terbentuk ketika terjadi pengarusutamaan system perekonomian menengah dan kecil yang dapat menciptakan keadilan social

¹⁸ Eko Prasajo, People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, No. 4, Vol. 2, 2004, h. 10-24.

seperti dalam system bagi-hasil, ekonomi syariah, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).¹⁹

Dalam beberapa tahun sejak pendiriannya, ICMI telah berhasil mendirikan beberapa bentuk lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Muslim di Indonesia. Beberapa lembaga yang berhasil didirikan oleh kepengurusan ICMI diantaranya: Bank Mu'amalat Indonesia (BMI), Yayasan Abdi Bangsa, dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Berikut akan dideskripsikan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat yang dilahirkan baik secara langsung oleh ICMI maupun dengan bekerjasama dengan lembaga lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

1. Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1412 H atau bertepatan dengan tanggal 1 November 1991. Perusahaan ini merupakan hasil dari prakarsa ICMI dan MUI yang didukung oleh beberapa pengusaha Muslim dan masyarakat. Bank Muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan ajaran syariah Islam dan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Peran masyarakat juga cukup penting dalam fase awal pendirian bank ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penanaman modal dari masyarakat khususnya di Jawa Barat yang menanamkan modal mereka sejumlah 106 milyar Rupiah pada saat acara bank Muamalat yang dilaksanakan di Istana Bogor.

Pada saat Indonesia terkena dampak krisis moneter pada tahun 1997-1998, BMI mengalami kerugian yang cukup besar. Tercatat perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 105 milyar. Hal inilah yang kemudian menyebabkan manajemen

¹⁹ Teguh Apriliyanto *et. al.*, *20 Tahun ICMI: Melanjutkan Long March di Milenium ke-21*, (Jakarta: ICMI, 2011), h. 140-148.

BMI untuk mengundang bantuan modal asing yang berasal dari Islamic Development Bank (IDB) yang kemudian menjadi salah satu lembaga yang memiliki saham pada bank ini. Dengan adanya suntikan dana dan permodalan dari IDB, BMI berhasil keluar dari krisis dan keluar dari keterpurukan. Saat ini BMI memiliki lebih dari empat juta nasabah dengan kantor cabang yang terdapat pada 33 provinsi di Indonesia dan terus mengembangkan bisnisnya di bidang perbankan dengan berupaya menggandeng nasabah Muslim dan Non Muslim.²⁰

Produk dan jasa pada Bank Muamalat Indonesia terdiri dari penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana merupakan kegiatan Bank Muamalat Indonesia untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui beberapa program diantaranya: Share yang merupakan tabungan investasi syariah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit, dan Phone Banking dalam satu kartu, Tabungan Ummat yang merupakan investasi murni yang sesuai dengan syariah dalam mata uang rupiah yang memungkinkan nasabah melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan mudah, Tabungan Ummat Junior yang merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus untuk pelajar, Tabungan Haji Arafah yang merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang nasabah inginkan, Deposito Mudharabah yang merupakan jenis investasi syariah, tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah atau USD, Deposito Fulinvest yang merupakan pilihan investasi dalam mata uang rupiah maupun USD dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan yang ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi secara halal, murni sesuai syariah, Giro Wadi'ah yang merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan aplikasi pemindah bukuan, dan DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat,

²⁰ <http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>. Diakses pada tanggal 1 September 2015.

merupakan lembaga yang menyelenggarakan program pensiun, yaitu suatu program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dilakukan secara berkala.²¹

Sementara itu, ada beberapa produk penyaluran dana bank ini. **Pertama**, Pembiayaan Jual Beli yang terdiri dari *Murabahah* yang merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli untuk pembiayaan modal, investasi, dan konsumtif dan *Istishna* yang merupakan kegiatan jual beli dimana produsen ditugaskan membuat barang pesanan dari pemesan. Objek pesanan harus dibuat atau di pesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus yang dipesan oleh pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau aset yang memiliki kriteria spesifik. **Kedua**, Pembiayaan Bagi Hasil yang terdiri dari *Musyarakah* yang merupakan kerjasama yang dilakukan antara bank dengan nasabah dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Umumnya digunakan untuk pembiayaan modal dan investasi dan *Mudharabah* yang merupakan kerja sama antara dua pihak dimana bank selaku penyedia dana dan pihak lain (nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Bank menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk di kelola. **Ketiga** Pembiayaan Sewa yang terdiri dari *Ijarah* yang merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa atas suatu barang atau aset milik bank. Bank mendapatkan jasa atas barang atau aset yang disewakan, *Ijarah Muntahia Bittamlik* (IMBT), merupakan perjanjian antara bank selaku pemberi sewa dengan nasabah selaku penyewa. Dengan konsep IMBT, nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan objek sewa tersebut dari pemberi sewa. Umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat besar dan *Qardh* yang merupakan pinjaman dari bank kepada nasabah yang

²¹ Abdul Mujib, Analisis Perlakuan Asuransi Istishna Bank Muamalat Indonesia, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar pinjaman dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Umumnya digunakan untuk pembiayaan dana talangan haji.²²

2. Yayasan Abdi Bangsa

Peran ICMI lainnya adalah dengan memprakarsai berdirinya Yayasan Abdi Bangsa yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1992. Yayasan ini merupakan salah satu bentuk usaha pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh ICMI dengan melaksanakan beberapa program seperti menerbitkan surat kabar *Republika* dan *Majalah Ummat*, mengembangkan *Islamic Center*, dan mendirikan *CIDES* (*Center for Information and Development Studies*). Pendiri yayasan ini terdiri dari 48 orang diantaranya B.J Habibi, Ginanjar Kartasasmita, Harmoko, Probo Sutedjo, Abu Rizal Bakri, Ibnu Sutowo, dan lain-lain. Sementara bertindak sebagai pelindung yaitu presiden RI, Suharto dan bertindak sebagai ketua badan Pembina yaitu B.J. Habibi.

Menurut Hasmi Wahyudi, proses berdirinya *Republika* sangat dipengaruhi oleh ICMI, dalam tulisanya dia mengungkapkan bahwa:

...Proses berdirinya *Surat Kabar Republika* tidak terlepas dari peran ICMI (*Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia*) dalam pendiriannya. Proses tersebut sesuai dengan realisasi hasil *Silaknas I* ICMI yang terbentuk rencana kerja konvergensi. Kemudian pendirian *Surat kabar Republika* dinyatakan secara tegas dalam program ICMI yang berbentuk *Rensi Jannah* (*Rencana Kerja Jangka Menengah*), dan *Rensi Jannatun* (*Rencana Kerja Jangka Tahunan*). Pada proses pendirian *Surat Kabar Republika* ICMI bekerja sama dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang penerbitan

²² *Ibid.* h. 40.

Koran. Mereka diantaranya adalah wartawan yang sebelumnya menangani harian Berita Buana, dan wartawan berpengalaman lainnya seperti Parni Hadi dari Antara. Mereka sepakat menamakan Koran yang akan dibentuk bernama Republik. Kemudian diubah menjadi Republika oleh Presiden Suharto setelah BJ Habibie menerimanya meminta izin prinsip. Setelah mendapatkan izin prinsip dari Presiden Suharto, mereka kemudian melakukan persiapan-persiapan untuk pendirian Republika. Hal tersebut dilaksanakan agar nanti Republika tidak hanya bertahan 1 hingga 2 tahun saja, mengingat Jumlah Koran terlalu banyak, sehingga merebut pembaca sangat ketat. Padahal kebudayaan komunikasi kita bukan budaya baca. Untuk itu tim-tim tersebut melakukan studi kelayakan Republika. Republika terbit untuk pertama kali pada 4 Januari 1993.²³

Dengan demikian peran ICMI dalam Yayasan Abdi Bangsa pada saat yang sama juga pada proses pendirian surat kabar Republika cukup penting. Walaupun demikian, dengan tegas Pimpinan Umum Republika, Parni Hadi, menyatakan bahwa ICMI tidak dapat mengintervensi pemberitaan Republika.²⁴

Pendirian Republika sendiri tidak lepas dari alasan ideologis-politis. Menurut David T. Hill, Republika dibangun setelah ICMI mampu mengenali “musuh bersama” dari kelompok minoritas yang menguasai konglomerasi media.²⁵ Dengan munculnya Republika, pemberitaan yang terkait dengan aktivitas umat Muslim di Indonesia khususnya menjadi cukup terakomodasi dalam pentas nasional. Hal ini tentu berbeda pada saat umat Islam tidak memiliki media massa di mana saat itu media massa nasional seperti Kompas cenderung mengabaikan pemberitaan terkait dengan aktivitas umat Islam. Dengan jaringan ICMI yang tersebar di seluruh Indonesia, Republika dapat didistribusikan kepada masyarakat menengah Muslim Indonesia khususnya di wilayah perkotaan. Saat ini Republika terus mengembangkan

²³ Hasmi Wahyudi, ICMI Proses Berdirinya Surat Kabar Republika (1992-1993), skripsi UI 2005.

²⁴ *Ibid.* lihat juga Alex Shobur, Peran Pers Islam dalam Upaya Mendorong Proses Demokratisasi di Indonesia, dalam *Mediator*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2004. h. 1-22.

²⁵ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 126.

bisnisnya dengan membuat jaringan berita *on line* yang dapat dibaca oleh masyarakat Muslim di Indonesia dan manca negara.

3. Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro di Indonesia yang cukup berperan penting dalam menggerakkan perekonomian riil di masyarakat. pengguna jasa BMT kebanyakan merupakan umat Muslim yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari pihak bank dan juga disebabkan karena adanya bunga yang cukup tinggi dari pihak bank. Sehingga banyak pelaku usaha mikro cenderung memilih BMT sebagai sumber permodalan.

Istilah BMT sendiri merupakan gabungan dari dua terminologi yaitu:

- a. *Baitul mal* atau rumah harta yang pada masa Rosulullah SAW difungsikan sebagai lembaga yang mengelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dan mendistribusikannya kepada kaum faqir, miskin, dan kelompok yang berhak menerimanya.
- b. *Baitul tamwil* atau rumah bisnis atau usaha.²⁶ *Baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis keuangan yang berorientasi pada keuntungan finansial. Secara teologis, pendirian BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ibadah anggotanya dan mewujudkan sebuah pola kehidupan sosial masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam aspek perekonomian.

Inisiasi pembentukan BMT dimulai pada tahun 1984 dan dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. BMT kemudian lebih dikenal sebagai salah satu bentuk pemberdayaan perwkonomian masyarakat yang dilaksanakan oleh ICMI. ICMI kemudian membuat sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti dengan membentuk Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Lembaga

²⁶ Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: 2004), UII Press. h. 125.

keuangan mikro ini dijalankan dengan prinsip-prinsip koperasi, non bunga, dan bagi hasil. Operasional BMT kemudian semakin diperkuat dengan adanya UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Saat ini setidaknya terdapat sekitar 3.000-4.000 BMT di seluruh Tanah Air.²⁷ Sedangkan jumlah dana yang berputar melalui BMT ini sudah mencapai angka 3,7 triliun Rupiah dan jumlah asetnya mencapai 4,7 triliun pada tahun 2015.²⁸ Perkembangan tersebut terjadi disebabkan oleh gerakan BMT yang berskala mikro, sehingga lebih dekat kepada masyarakat menengah ke bawah. Cukup dengan sejumlah modal dan beberapa orang yang bersedia menggerakkan dengan prinsip syariah, maka BMT sudah dapat didirikan, bahkan di desa terpencil sekalipun.

Perhatian ICMI terhadap perkembangan BMT semakin tercermin dari periode kepemimpinan ICMI tahun 2005-2010 yang menekankan program-program ICMI yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan basis ekonomi kerakyatan. Program ICMI pada periode 2005-2010 diantaranya:

Pertama, program pengembangan lembaga keuangan mikro dan makro yang mencakup Baitul Mal wa Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah, bank Syariah, Asuransi Syariah, dan Reksadana Syariah yang dikembangkan untuk memobilisasi dana masyarakat bagi peningkatan ekonomi. Dalam program ini ICMI meminta kepada PINBUK dan asosiasi BMT se-Indonesia untuk mengembangkan 10.000 BMT menjelang tahun 2010 dan 20.000 BMT menjelang tahun 2015.

Kedua, program pengembangan usaha mandiri di berbagai sector ekonomi, seperti agribisnis, perkebunan, kemaritiman, pertambangan, manufaktur, elektronik, perdagangan, telekomunikasi dan komunikasi, penerbitan, peternakan, agroindustry, jasa kesehatan, dan jasa konstruksi.

²⁷ <http://m.inilah.com/news/detail/2113778/masa-depan-bmt-semakin-cerah>. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

²⁸ Lihat, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmh1b-aset-bmt-indonesia-capai-rp-47-triliun>. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

Ketiga, program pengembangan kemitraan dan kesetaraan dalam bidang ekonomi dan social yang dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.²⁹

ICMI sebagai organisasi yang peduli pada pemberdayaan masyarakat miskin pada periode kepengurusan 2010-2015 juga telah mencanangkan gerakan SDSB (Satu Desa Satu BMT).³⁰

4. Asuransi Takaful

Program ini diawali dari sebuah kepedulian untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia dengan terbentuknya Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), TEPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994.³¹

Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 1994 Takaful Indonesia mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) yang bergerak di bidang asuransi jiwa syariah dan PT Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) yang bergerak di bidang asuransi umum syariah. Takaful Keluarga kemudian diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Sedangkan Takaful Umum diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie selaku ketua sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada 2 Juni 1995. Sejak saat itu,

²⁹ Teguh, *Op. Cit.* h. 151-152.

³⁰ <http://www.icmi.or.id/blog/2015/06/icmi-sdsb-untuk-bantu-industri-non-bank>. Diakses pada tanggal 3 September 2015. Program SDSB ini sejalan dengan program pemerintah Jokowi yang akan mengalokasikan dana sebesar 1,4 milyar setahun untuk setiap desa. BMT sebagai institusi keuangan mikro dianggap dapat mengarahkan program pembangunan desa tersebut agar tepat sasaran.

³¹ <http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan>. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

Takaful Keluarga dan Takaful Umum berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi syariah terkemuka di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan bisnis syariah yang semakin maju, Asuransi Takaful Keluarga berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu berperan dalam menguatkan simpul-simpul pembangunan ekonomi syariah, demi masa depan Indonesia yang gemilang.

Perusahaan ini memiliki visi: Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan Misi perusahaan ini diantaranya:

- Menyelenggarakan bisnis asuransi syariah secara profesional dengan memiliki keunggulan dalam standar operasional dan layanan.
- Menciptakan sumberdaya manusia yang handal melalui program pengembangan sumberdaya manusia yang berkelanjutan.
- Mendayagunakan teknologi yang terintegrasi dengan berorientasi pada pelayanan dan kecepatan, kemudahan serta informatif.³²

5. Program Pelatihan dan Pendampingan Masyarakat

Selain pendirian bank Muamalat, Yayasan Abdi Negara, dan BMT, ICMI juga menjalankan program yang terkait langsung dengan masyarakat. Program ICMI itu adalah program pelatihan dan pendampingan masyarakat yang dalam Silaknas tahun 2008 digulirkan melalui:

1. ICMI menyiapkan tenaga pendamping sebagai motivator dan fasilitator untuk pemberdayaan masyarakat berbasis unggulan lokal;

³² *Ibid.*

2. Pemberdayaan masyarakat diarahkan kepada program unggulan lokal yang diprioritaskan kepada komoditi, antara lain:
 - a. Bambu
 - b. Ubi kayu (tepung, bio etanol)
 - c. Kelapa
 - d. Pengolahan ikan dan rumput laut
 - e. Ternak sapi
3. Program pelatihan dilakukan di tingkat kabupaten/kota (tingkat Orda) dengan peserta diutamakan sarjana 5 orang utusan tiap kecamatan atau sekitar 50 orang tiap kabupaten. Pelatihan terdiri atas 3 komponen: 1) Pelatihan Karakter (perubahan *mind set*); 2) Pelatihan BMT; 3) Pelatihan teknis/kompetensi sesuai unggulan lokal masing-masing daerah. Pelatihan ini dilakukan secara terintegrasi oleh Pusat Pelatihan MHMMD³³, PINBUK, Bank Muamalat, PNM³⁴, dan Orda ICMI.
4. Pelatihan dilaksanakan dalam 3 zona (Timur, Tengah, dan Barat) masing-masing dipilih Orwil dan Orda aktif di Papua, NTB, Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi barat, Maluku, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Barat, dan Aceh.³⁵

Kesimpulan

ICMI sejak berdiri pada tahun 1990 telah memiliki komitmen yang cukup tinggi terkait dengan permasalahan umat Islam di Indonesia. Walaupun beberapa pihak meragukan pembentukan ICMI karena pembentukannya ditengarai hanya sebagai

³³ MHMMD merupakan kepanjangan dari Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan. Lembaga ini merupakan lembaga pelatihan yang dibentuk oleh Marwah Daud Ibrahim, salah satu pengurus perempuan ICMI Pusat.

³⁴ Permodalan Nasional Madani

³⁵ Teguh, *Op. Cit.* h. 155.

kendaraan politik Suharto dan Habibi untuk meraih simpati umat Islam untuk mendukung pemerintahannya menjelang Pemilu 1992, namun ICMI berhasil membuktikan diri bahwa pendirian ICMI tidak didasari kepentingan sesaat dan tertentu dari penguasa ketika itu. Hal ini dapat ditandai dengan munculnya program-program ICMI yang dilandasi untuk membangun masyarakat Islam di Indonesia yang walaupun mayoritas namun masih terpuruk dalam berbagai macam aspek baik politik, hukum, budaya, dan ekonomi.

Beberapa program khususnya yang terkait dengan perekonomian umat terasa cukup fenomenal dan bahkan hingga kini keberadaannya sangat dirasakan oleh masyarakat adalah dengan berdirinya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang saat ini jumlahnya sudah lebih dari 3000 buah di seluruh Indonesia dan membantu para pengusaha mikro untuk terlepas dari para rentenir. Berdirinya Bank Muamalat dan BMT yang mampu menyerap dana yang cukup besar dari masyarakat Muslim untuk membangun perekonomian yang berasal dari beragam lapisan masyarakat telah memberi kontribusi yang cukup penting bagi umat Islam dalam upaya mengamalkan ajaran agamanya di bidang muamalat. Sedangkan berdirinya Republika sebagai surat kabar umat Muslim mampu menjadi penyeimbang terhadap berita-berita yang memojokkan umat Islam baik di dalam negeri maupun di manca negara.

Hingga hari ini, ICMI tetap memiliki daya tarik dan cukup disegani sebagai sebuah organisasi kumpulan kaum cendekia. Para pengurusnya di level pusat terdiri dari akademisi, ulama, politisi, birokrat, dan pengusaha yang tetap memandang bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah dan seluruh komponen umat Muslim di Indonesia. ICMI mungkin tidak lagi memiliki kekuatan politik sebesar ketika Suharto berkuasa namun gerakan kultural melalui pemberdayaan yang saat ini dilakukan oleh ICMI tetap dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Jika ICMI terus konsisten dan berhasil menjalankan program-program pemberdayaan ini, ada kemungkinan ICMI akan kembali muncul ke

gelanggang perpolitikan nasional dengan basis kemasyarakatan, keindonesiaan, dan keislaman yang lebih kuat dan mengakar.

Referensi

- Apriliyanto, Teguh, *et. al.*, *20 Tahun ICMI: Melanjutkan Long March di Milenium ke-21*, (Jakarta: ICMI, 2011)
- Hafner, Robert W., Islam, State, and Civil Society: ICMI and The Struggle for the Indonesian Middle Class, in *Indonesia* (56 Okt. 1993).
- Hill, David T, *Pers di Masa Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- Hodgson, Marshal, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, vol. 2 (Chicago: The University of Chicago Press, 1974).
- Latif, Yudi, *Indonesian Muslim Intelligentsia and Power*, (Singapore: ISEAS, 2008).
- Mujib, Abdul, Analisis Perlakuan Asuransi Istishna Bank Muamalat Indonesia, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.
- Prasojo, Eko, People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, No. 4, Vol. 2, 2004
- Ramage, Douglas E., *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*, (London: Routledge, 1995)
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. (Yogyakarta: 2004), UII Press.
- Shobur, Alex, Peran Pers Islam dalam Upaya Mendorong Proses Demokratisasi di Indonesia, dalam *Mediator*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2004.
- Wahyudi, Hasmi, ICMI Proses Berdirinya Surat Kabar Republika (1992-1993), skripsi UI 2005.
- Woodward, Mark, *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*, (Tuscon: University of Arizona Press, 1989).

Sumber Internet

<http://www.icmi.or.id/organisasi/sejarah#>. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2015.

<http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/profil-muamalat>. Diakses pada tanggal 1 September 2015.

<http://m.inilah.com/news/detail/2113778/masa-depan-bmt-semakin-cerah>. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/03/22/nlmh1b-aset-bmt-indonesia-capai-rp47-triliun>. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

<http://www.icmi.or.id/blog/2015/06/icmi-sdsb-untuk-bantu-industri-non-bank>. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

<http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan>. Diakses pada tanggal 3 September 2015.

